

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Undang Undang Wajib Belajar

Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pendidikan yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada pendidikan dasar sembilan tahun. Jadi setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Seperti yang diketahui oleh masyarakat umum, pendidikan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu dan yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dimulai sejak Pelita IV. Pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi presiden

Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Dua kenyataan mendorong segera dilaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 1983 terdapat sekitar dua juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencantumkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mei 1984 dipandang sebagai sembilan pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan (Haris Mudjiman, 1994:1-2).

Peningkatan pendidikan wajib belajar, menjadi pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-

Undang RI No: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berikut:

1. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah diatur lebih luas di dalam UU No: 20 tahun 2003. Bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5). Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya (Arifin, 2003: 11).

Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia adalah: (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, (3) tidak diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, yaitu mereka tidak tamat sekolah dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
2. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan, dasar sembilan tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar sembilan tahun, diharapkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara beranekaragam (diversified).

3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.
5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar sembilan tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program-program pendidikan wajib belajar sembilan tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu masyarakat itu sendiri mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

Dengan demikian, diharapkan jumlah anak putus sekolah bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di

Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk ke sekolah, tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas. Namun rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat mengakibatkan program ini terhambat. Terkait dengan itu semua sebagai masyarakat yang baik, kita harus ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun ini. Karena program ini sangat baik untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap masa depan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

1.1. Tujuan Pendidikan

Secara sederhana, tujuan mengandung arti arah atau maksud yang hendak di capai lewat upaya atau aktifitas. Dengan adanya tujuan, semua aktivitas dan gerak manusia terarah dan bermakna, tanpa tujuan semua aktivitas akan menjadi kabur dan terombang ambing. Dengan demikian, seluruh karya dan karsa manusia harus memiliki orientasi tertentu, tiada aktivitas tanpa tujuan. Namun demikian, upaya memformalisasikan suatu bentuk tujuan, tidak terlepas dari pandangan hidup dan nilai religius pelaku aktivitas itu sendiri. Maka tidaklah heran jika terdapat berbedanya tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing manusia, baik dalam suatu masyarakat, bangsa, maupun negara, karena berbedanya kepentingan yang ingin dicapai.

Disuatu kegiatan yang terencana dan sistematis maka prose pendidikan yang diselenggarakan hanya untuk dan atau diorientasikan pada tujuan-tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, baik dalam lingkungan intruksional, institusional maupun dalam lingkup nasional. Namun demikian, penjabaran-penjabaran tujuan pendidikan pada masing-masing tahapan seperti yang tercermin itu, hanya semata-mata diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, artinya ruang lingkup yang terurai dalam tahap yang paling ujung (misal tujuan pengajaran) harus mendukung tujuan pada tahapan berikutnya (tujuan lembaga) dan akhirnya harus mendukung tujuan pendidikan Nasional.

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa : Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-Undang RI No. 20,2003: 6).

Apabila tujuan umum pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU pendidikan tersebut, tampak bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan membantu mengembangkan totalitas keperibadian atas dasar ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Secara tersurat maupun tersirat bahwa tujuan pendidikan nasional mengisyaratkan bahwa aspek fisik, sosial, kognitif, efektif dan konatif adalah faktor-faktor keperibadian yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Perkembangan semua aspek tadi harus ter integrasi dalam ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan kata lain bahwa melalui pendidikan warga negara dibantu untuk mencapai tarap kehidupan yang bermakna secara menyeluruh, maka tujuan pendidikan secara universal dapat dijelskan sebagai berikut :

1. Bisa membawa anak didik pada pengertian hakekat diri sendiri, membangun kemanusiaanya dan melaksanakan misi hidup masing-masing. Ringkasnya menjadi manusia yang baik
2. Mengantar anak didik kedalam dunia peradaban yang terus menerus dan dinamis. Jadi membangun tipe manusia pembangun yang rajin, ulet, berani, jujur dan cocok dengan zamannya (dikutip Kartono, 1991 : 14).

Apabila di simak antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan yang bersifat unifersal tersebut, maka dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut diarahkan untuk mancapai tujuan yang universal itu.

Tujuan pendidikan adalah memcapai pertumbuhan manusia yang menyeluruh secara seimbang melauai latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan dan indra (dikutip Azra, 1999 : 57).

Sedangkan pendapat Zuhairini bahwa tujuan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal terdapat dua macam, yakni : Tujuan Umum dan Tujuan khusus. Tujuan Umum pendidikan yaitu membimbing anak agar mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal shalih dan berakhlak serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara.

Tujuan pendidikan tersebut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan. Karena dalam pendidikan yang perlu ditanamkan akan menghasilkan ketaatan menjalankan kewajiban agama.

1.2. Fungsi Pendidikan

Optimalisasi proses penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya adalah untuk menunaikan fungsinya dalam konstelasi pengembangan SDM, hal ini mengingat bahwa proses pendidikan itu hanya untuk dan terfokus pada pemberdayaan keperibadian individu agar pada akhirnya bermuara pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Jika diperhatikan dari sudut kepentingan masyarakat maka proses pelaksanaan pendidikan merupakan upaya sadar dari sekelompok masyarakat untuk mengembangkan individu agar ia dapat hidup selaras dengan kepentingan nilai-nilai yang telah diciptakan oleh lingkungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan apabila dilihat dari kepentingan individu, maka proses pendidikan yang ia peroleh merupakan usaha dan yang bersangkutan untuk mengembangkan diri dalam rangka pencapaian tingkat perkembangan yang baik sesuai dengan setandar yang ada dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Keterkaitan antara masyarakat dengan individu bagi proses pendidikan melahirkan beberapa fungsi. Hal ini dapat diperhatikan melalui kutipan dibawah ini.

Pendidikan itu memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi pengembangan, artinya pendidikan bertanggung jawab mengembangkan potensi individu yang bersifat unik, dimana pendidikan seyogyanya memperkaya keterampilan dalam segi ilmu pengetahuan. Penyesuaian diri, filsafat hidup maupun dalam segi pekerjaan, melalui pendidikan individu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, kecakapan dan bakat-bakat khusus yang di milikinya.
2. Fungsi peragaman, artinya keragaman kecakapan. Minat dan tujuan siswa tereflesikan di dalam pola kematangan prilakunya, keterampilan ini mengharuskan pendidikan untuk menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan individu.
3. Fungsi integrasi, artinya fungsi pengembangan dan peragaman harus diikuti dengan fungsi inpegrasi. Fungsi ini berkenaan dengan upaya membantu siswa mencapai keterpaduan hidup di dalam masyarakat dengan memiliki indentitas diri yang kuat (Sunarya dkk, 1988 : 12).

Jika disimak tentang ketiga fungsi pendidikan tersebut di atas, maka seharusnya di dalam lembaga pendidikan formal (khususnya dalam sistem persekolahan) dari tingkat pendidikan dasar sampai jenjang yang tertinggi telah dapat menggali dan menemukan potensi yang dimiliki peserta didiknya untuk dapat memfungsikan pendidikan yang ia terima secara optimal, sesuai dengan bakat, minat dan kecakapan-kecakapan yang ada pada dirinya, sehingga tujuan-tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan harapan-harapan baik secara personal maupun dalam skala nasional.

Pendidikan bagi suatu bangsa sangat penting artinya sebab pendidikan ini berfungsi sebagai berikut :

1. Pelestarian nilai-nilai terpuji dalam masyarakat yang dikehendaki untuk dipertahankan

2. Pengembangan nilai-nilai baru yang dianggap serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan modernisasi.
3. Membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil serta dapat meningkatkan produktifitas, mutu dan efesien kerja.
4. Jembatan masa kini dan masa yang akan datang
5. Pembentukan pribadi-pribadi yang memiliki kepercayaan diri dan bertanggung jawab, serta mampu mengungkapkan dirinya maupun media yang ada maupun dalam melakukan hubungan manusiawi, bertindak efesien dan menjadi warga negara yang baik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).

Adapun spesifikasi fungsi pendidikan nasional adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU pendidikan nasional No 2 Tahun 1989 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “ Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan Nasional” (UU Pendidikan, 1989).

Agar dapat memfungsikan pendidikan nasional tersebut, maka fungsi-fungsi yang bersifat umum di atas tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan, sebab titik tolaknya harus melalui individu untuk mencapai fungsi pendidikan yang bersifat nasional yang dimaksud.

1.3 Tingkat Pendidikan Nasional

Istilah pendidikan telah dikenal orang sejalan dengan sejarah peradaban manusia, artinya pendidikan merupakan salah satu faktor peradaban manusia dan keberadaan peradaban itu sendiri dapat tumbuh dan berkembang melalui dunia pendidikan. Oleh karenanya pendidikan adalah jiwa kehidupan dan kehidupan ini memiliki makna manakala dibarengi dengan proses pendidikan yang relevan dengan tujuan dan tuntunan masyarakat

Hidup dan kehidupan manusia selamanya tidak terlepas dari sumbangan yang diberikan oleh pendidikan, memang tanpa makan dan bernafas manusia tidak akan mampu bertahan di dalam hidup dan kehidupannya. Tetapi hidup dan kehidupan yang berhasil sesuai dengan nilai-nilai manusiawi bagi diri dan lingkungan seseorang mutlak memerlukan bekal kemampuan jasmaniah dan rohaniah, dari manusia itu sendiri (dikutip Tim Dosen IKIP Malang, 1982).

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang harus ada dalam membina dan mengasah hidup yang memiliki makna sesuai dengan nilai kemanusiaan melalui proses pendidikan pada dasarnya adalah perkembangan sumber daya insani, dimana dalam hal ini pendidikan berfungsi untuk memungkinkan setiap manusia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat, melalui pendidikan setiap manusia pada hakekatnya harus mampu menghayati dan melaksanakan nilai-nilai secara

kreatif dan dapat meningkatkan kemampuan untuk memperoleh dan menciptakan pekerjaan melalui bermacam-macam kemungkinan.

Dengan beberapa ulasan di atas, pada hakekatnya telah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan dapat menghantarkan anak didik kesuatu tingkat pendidikan tertentu yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan sumber daya manusia. Secara operasional pendidikan diartikan sebagai.

Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang (Djazuli, 1994). Dalam sistem pendidikan nasional, jenjang pendidikan formal adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 sebagai berikut :

1. Jenjang pendidikan termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tingkat tinggi
2. Selain jenjang yang dimaksud pada ayat (a) dapat diselenggarakan pendidikan pra-sekolah (1997 : 7).

Apabila diperhatikan pernyataan UU tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa jalur pendidikan formal diatur kedalam jenjang dengan pendidikan pra-sekolah sebagai salah satu jenjang pendidikan alternatif.

2. Pengertian Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak – hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Undang – Undang nomor 4 Tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar. Dan Menurut Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.

Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa anak putus sekolah adalah mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan beberapa hal bisa adri diri anak dan dari luar diri anak yang berpengaruh terhadap pola berpikir anak terhadap dunia pendidikan

3. Akibat Anak Tidak Mendapatkan Pendidikan/Putus Sekolah

Sekolah menyiapkan peserta didik untuk hidup eksis dalam dunia kerja dan fungsional dalam masyarakat, mengembangkan kebudayaan dan partisipasi social, menciptakan individu yang berdaya saing tinggi, melahirkan manusia

yang berani dan mau bertanggungjawab, dan memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan sains.

Apabila sekolah sebagai satuan pendidikan dapat berperan dengan maksimal dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat dapat tercerdaskan dan terangkat harkat dan martabatnya. Namun, kini masih banyak masyarakat yang putus sekolah yang tentunya menjadi hambatan dalam 'pengikisan' pengangguran dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut di antara dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak yang putus sekolah adalah:

1. Menambah jumlah pengangguran.
2. Kerugian bagi masa depan anak, orang tua dan masyarakat, serta bangsa
3. Menjadi beban orang tua, dan
4. Menambah kemungkinan terjadinya kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat

4. Faktor Yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah

Kalau kita melihat mengapa anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah, wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak yaitu lingkungan.

Hal-hal yang mempengaruhi anak itu antara lain adalah latar belakang pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi keluarga, kurangnya minat anak untuk sekolah, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan.

4.1 Faktor Internal

Yang menyebabkan anak putus sekolah bukan hanya disebabkan oleh latar belakang pendidikan orang tua, juga lemahnya ekonomi keluarga tetapi juga datang dari dirinya sendiri yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah.

Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah: anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya orang-orang terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

Anak seusia wajib belajar sudah mengenal bahkan sudah mampu untuk mencari uang terutama untuk keperluannya sendiri seperti jajan dan lain-lain, hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap cara dan sikap anak dalam bertindak dan berbuat. Karena sudah mencari uang sendiri dan merasakan enaknyanya membelanjakan uang akhirnya tanpa terasa sekolah ditinggalkan begitu saja.

Sekolah harus belajar dengan sungguh-sungguh dan anak berada di sekolah hampir setengah hari penuh tanpa sedikit pun menghasilkan uang dan bahkan harus mengeluarkan uang karena keperluan sekolah dan jajan

secukupnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka malas untuk bersekolah.

Selain itu tinggi rendahnya minat untuk meneruskan sekolahnya juga di pengaruhi oleh prestasi belajar anak itu sendiri. Anak yang berprestasi belajarnya rendah, tentu tidak naik kelas. Artinya di anak tetap tinggal di kelas, dengan harapan agar dia dapat meningkatkan prestasinya.

Anak didik yang gagal dalam belajar dan tidak naik kelas ada dua kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Pertama dia akan merasa malu terhadap teman-teman dan guru di sekolah karena ia tidak bisa seperti teman-temannya, maka ia malas untuk pergi ke sekolah. Kedua yaitu kegagalan dalam belajar akan menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan rajin agar dapat menandingi teman-temannya, dan kalau bisa lebih baik/tinggi dari teman-temannya semula,

Sangatlah disayangkan, kemungkinan yang kedua ini jarang terjadi pada diri anak didik. Yang sering terjadi adalah kemungkinan pertama, bila gagal dalam belajar maka anak akan malas pergi ke sekolah dan meninggalkan sekolahnya yang belum selesai.

4. 2 Faktor Eksternal

a. Latar belakang pendidikan orang tua

Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar apalagi tidak tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan terhadap cara berpikir

orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan cara pandangan orang tua tentu tidak sejauh dan seluas orang tua yang berpendidikan lebih tinggi.

Orang tua yang hanya tamat sekolah dasar atau tidak tamat cenderung kepada hal-hal tradisional dan kurang menghargai arti pentingnya pendidikan. Mereka menyekolahkan anaknya hanya sebatas bisa membaca dan menulis saja, karena mereka beranggapan sekolahnya seseorang kepada jenjang yang lebih tinggi pada akhir tujuan adalah untuk menjadi pegawai negeri dan mereka beranggapan sekolah hanya membuang waktu, tenaga dan biaya, mereka juga beranggapan terhadap anak lebih baik ditunjukan kepada hal-hal yang nyata yaitu membantu orang tua dalam berusaha itu lah manfaat yang nyata bagi mereka, lagi pula sekolah harus melalui seleksi dan ujian yang di tempuh dengan waktu yang panjang dan amat melelahkan. Walaupun ada orang tua yang pendidikannya tidak tamat Sekolah Dasar, namun anaknya bisa menjadi sarjana tetapi hal ini sangat jarang sekali.

Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah merupakan suatu hal yang mempengaruhi anak sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah dalam usia sekolah. Akan tetapi ada juga orang tua yang telah mengalami dan mengenyam pendidikan sampai ke tingkat lanjutan dan bahkan sampai perguruan tinggi tetapi anaknya masih saja putus sekolah, maka dalam hal ini kita perlu mengkaitkannya dengan minat anak itu sendiri untuk sekolah, dan mengenai minat ini akan dijelaskan pada uraian berikutnya.

b. Lemahnya Ekonomi Keluarga

Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari misalnya anak membantu orang tua ke sawah, karena dianggap meringankan beban orang tua anak di ajak ikut orang tua ke tempat kerja yang jauh dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama.

Mereka menjadi buruh tanpa tujuan untuk membantu pekerjaan orang tua, setelah merasa enaknya membelanjakan uang hasil usaha sendiri akhirnya anak tidak terasa sekolahnya ditinggalkan begitu saja, anak perempuan di suruh mengasuh adiknya di waktu ibu sibuk bekerja.

Hal-hal tersebut di atas sangat mempengaruhi anak dalam mencapai suksesnya bersekolah. Pendapatan keluarga yang serba kekurangan juga menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak keran setiap harinya hanya memikirkan bagaimana caranya agar keperluan keluarga bisa terpenuhi, apalagi kalau harus meninggalkan keluarga untuk berusaha menempuh waktu berbulan-bulan bahkan kalau sampai tahunan, hal ini tentu pendidikan anak menjadi terabaikan.

Yang menyebabkan orang tua kurang pendapatan karena produksi hasil bumi menempati lahan yang kurang baik, karena kalau air sungai

saatnya pasang maka lahan pertanian akan menjadi banjir dan menenggelamkan semua tanaman, hal ini kalau sering terjadi menyebabkan orang tua anak yang tinggal di desa menyebabkan akan sering menemui kegagalan mas panen. Sedangkan kalau musim kemarau lahan pertanian akan kekeringan sampai tanah menjadi pecah-pecah, hal ini menjadikan tanaman menjadi tidak berbuah maka para petani kembali menemui kegagalan dalam masa panen. Di tambah dengan tidak pernah hadir dalam penyuluhan yang jarang di adakan sehingga mereka bercocok tanam hanya secara tradisional, tidak mengetahui akan manfaat pupuk serta kurang mengetahui alat-alat pertanian yang baik, hal ini juga menyebabkan sering gagalnya dalam pertanian. Kegagalan demi kegagalan akhirnya orang tua banyak yang beralih profesi dari bertani mencoba kepada pekerjaan lain yang mana para orang tua yang tinggal di desa yang serba minim memiliki keterampilan serta pengetahuan yang kurang luas tentang dunia usaha sehingga sering menemui kegagalan dalam berusaha.

Lemahnya ekonomi keluarga juga karena banyaknya jumlah anggota keluarga yang menyebabkan kepala keluarga menjadi sibuk untuk mencukupi keperluan keluarga dan juga menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya.

c. Kondisi Tempat Tinggal Anak

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif.

Untuk membina anak kearah yang lebih positif dan bermanfaat adalah dengan adanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga anak timbul saling pengaruh dengan proses pendidikan akan berjalan dengan lancar dan baik.

Adanya saling kontak dan berhubungan memang sangat baik, karena akan membuka wawasan pikiran kearah yang lebih maju, membantu kegiatan belajar dll. Itu kalau kita lihat dari segi positifnya. Tetapi sebaliknya berhubungan juga akan menimbulkan hal-hal yang negatif bila si anak akan terpengaruh kepada hal-hal yang kurang baik, dalam hal akan mengakibatkan kegagalan dalam sekolah.

Pengaruh-pengaruh yang negatif inilah yang harus kita hilangkan didalam masyarakat dengan begitu akan membantu suksesnya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat, kawan sepergaulan, juga ikut serta memotivasi terlaksana kegiatan belajar anak.

d. Suasana Lingkungan

suasana lingkungan sebenarnya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar bagi anak. Lingkungan yang tenteram,nyaman,damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Sebaliknya lingkungan yang ribut,tidak aman,hingar bingar akan menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kelangsungsn proses belajar anak di sekolah.

Adanya suasana lingkungan masyarakat yang kurang baik, akan mengganggu anak dalam belajar dan secara langsung akan mempengaruhi prestasi belajar yang diperoleh disekolah. Bisa juga disebabkan suasana yang ribut tapi menyenangkan hati anak,akan akan terpengaruh dan ikut serta di dalamnya dan ia lupa bahwa dirinya seorang pelajar.

Seorang pelajar tidak pantas melakukan hal-hal yang negatif,karena akan merugikan,tugas pelajar adalah belajar,agar suatu hari nanti menjadi orangyang bermanfaat bagi banyak orang.

e. Kawan Sepergaulan

kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri,karena kita membutuhkan manusia yang lain. Kebanyakan manusia bila mencari teman yang sebanding dengannya, maksudnya kalau anak berteman dengan anak orangtua dengan orang tua tua pula. Karena hal ini didasari oleh adanya persamaan-persamaan antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Bagaimanapun juga adanya pergaulan ini mempunyai pengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan cara bertindak dan lain sebagainya dari setiap individu. Dimana pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.

1. Yang Bersifat Positif

Bergaul dan berteman dengan orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan yang lebih dari kita, akan mendapatkan manfaat kepada kita khususnya, dan akan membantu dan memotivasi kita dalam belajar menuntut ilmu. Bila kita menemui kesulitan akan mudah bertanya/minta bimbingan kepada mereka yang lebih tahu.

Selain itu, bergaul dengan orang yang berpengetahuan juga mendatangkan ketentraman, karena diri kita bisa merasa dapat diterima oleh lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian terjalin kerja sama bantu membantu antara sesama di dalam mensukseskan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

2. Yang Bersifat Negatif

Bergaul dengan orang abik bisa mendatangkan pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif tersebut antara lain :

- Bila seorang anak didik mempunyai kawan sepergaulan rata-rata tidak sekolah, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi kepada si anak. Khususnya yang berhubungan dengan kelangsungan dan kelancaran pendidikan anak disekolah, atau akan mengganggu

belajar anak dirumah, seperti kawannya mengajk jalan-jalan,ngbrol-ngobrol dll hingga tidak ingat waktu belajar.

- Bila anak didik bergaul dengan anak yang tidak bermoral/akhlak yang tidak baik,pada suatu saat nanti akan terpengaruh dan turu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik,disebabkan setia kawan dll yang dapat menjerumus anak didik. Dan akhirnya akan mengganggu pelajar di sdekolah,kemudian putus sekolah.

f. Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan

Pandangan masyarakat terhadap pendidikan juga berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan di bangku sekolah.

Pandangan masyarakat yang maju tentu berbeda dengan masyarakat yang keterbelakangan dan tradisional, masyarakat yang maju tentu pendidikan mereka majumpula,demikian pula ank-anak mereka akan menjadi bertambah maju pula pendidikannya dibandingkan dengan orangtua mereka.

Maju mundurnya suatu masyarakat,bangsa dan negara juga ditentukan dengan maju mundurnya pendidikan yang dilaksanakan.

Pada umumnya masyarakat yang terbelakang atau masyarakat tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan,sehingga kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalayu sekolah kebanyakan putus di tengah jalan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat sulit, merasa tidak mampu, mempengaruhi, buang waktu banyak, lebih baik baik bekerja sejak anak-anak ajakan membantu orangtua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis, juga karwaan anggapan mereka tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi pegawai negeri, hali ni tentu karena kurang memahami arti, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional.

Masyarakat yang tradisional kalau mereka memahami fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada akhirnya akan menjadi masyarakat yang maju dan berkembang.

Masyarakat yang terpencil atau masyarakat yang tradisional juga beranggapan bahwa sekolah itu pada dasarnya sedikit sekali yang sesuai dengan kehendak mereka, misalnya begitu tamat sekolah langsung mendapatkan pekerjaan, sekolah hendaknya tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang sama.

Hal tersebut ada hubungan dengan pendapat seorang ahli sosiologi yang bernama Surjadi, A. dalam bukunya yang berjudul pembangunan masyarakat pedesaan, mengemukakan "sekolah itu pada intinya merupakan lembaga asing yang sedikit saja relevansinya langsung dengan kegiatan masyarakat".

Mungkin kalau pendidikan itu sesuai dengan kehendak mereka maka masyarakatpun juga akan mendukungnya, namun semua itu hanya keinginan mereka tanpa harus berjuang dan berusaha secara semaksimal

5. Pengertian Hak Anak Akan Pendidikan

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan.

Pendidikan itu tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya tanggung jawab sekolah. Konsekuensinya semua warga negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan pendidikan. Sehingga ketika ada anggota masyarakat yang tidak bisa sekolah hanya karena tidak punya uang, maka masyarakat yang kaya atau tergolong sejahtera memiliki kewajiban moral untuk menjadi orang tua asuh bagi kelangsungan sekolah anak yang putus sekolah pada tahun ini mencapai puluhan juta anak di seluruh Indonesia.

Pendidikan itu dimulai dari keluarga. Paradigma ini penting untuk dimiliki oleh seluruh orang tua untuk membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa – masa selanjutnya.

Pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya tujuan nasional tersebut mengakibatkan bahwa kewajiban mencerdaskan bangsa melekat pada eksistensi negara. Dengan kata lain, bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka negara Indonesia dibentuk.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dicapai melalui proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran. Proses pendidikan itu sendiri berlangsung sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat dan bisa didapat di mana saja dan kapan saja. Dalam pemenuhannya di lapangan, pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenisnya.

Undang-undang Tahun 1945 menempatkan bidang pendidikan dalam derajat keseriusan yang tinggi, terbukti dengan adanya rumusan pasal khusus tentang pendidikan. Pasal-pasal tersebut mengatur mulai dari hak warga negara mendapatkan pendidikan sampai dengan peran pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 31 Undang-Undang 1945 mengamanatkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan sebenarnya juga merupakan bagian dari hak asasi

manusia, seperti termaktub dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang 1945.

5.1. Hak Pendidikan Secara Konstitusional

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1945 jelaslah bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Atau dengan kata lain, hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, yang lazim dipahami sebagai hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.

Mengingat fungsi utama Undang-Undang ialah memberikan perlindungan terhadap individu dan hak-hak dasar dari individu-individu tersebut terutama warga negara, maka ketika hak dasar sudah dijamin di dalam konstitusi maka hak dasar itu menjadi hak konstitusional. Di negara hukum, hak-hak dasar atau hak asasi (basic right) setiap warga negara yang kemudian menjadi hak konstitusional bukan sekadar harus dihormati dan dilindungi, melainkan juga harus dijamin pemenuhannya.

Atas dasar itulah, hak hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi, tetapi menimbulkan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Agar tanggung jawab negara dapat dipenuhi

dengan baik maka Undang-Undang 1945 misalnya, melalui Pasal 31 Ayat (2) mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. Bahkan, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara itulah pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, hadir di tengah masyarakat dalam upaya mewujudkan visi pendidikan nasional. Keberadaan perguruan tinggi sangat penting bagi sebuah bangsa. Dari perguruan tinggi inilah lahir orang-orang dengan kapasitas dan kualifikasi yang baik sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan bangsa dan tantangan zaman yang demikian dinamis. Itu pula sebabnya, perguruan tinggi kerap disebut sebagai lahan penyemaian generasi mendatang yang memiliki karakter pembaharu, memiliki tradisi dan budaya intelektual serta memiliki gagasan-gagasan baru dalam menyikapi dan menjawab persoalan kehidupan.

6. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.

6.1 Program Pemerinta Melalui BOS (bantuan operasional sekolah)

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

| | |
|----------------|----------------------------|
| SD/SDLB | : Rp 580.000,-/siswa/tahun |
| SMP/SMPLB/SMPT | : Rp 710.000,-/siswa/tahun |

6.2 Permasalahan Program BOS (bantuan operasional sekolah)

Program wajib belajar 12 tahun sudah dilaksanakan yang menargetkan pada sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, hal ini dilakukan sebagai dasar untuk mengentaskan anak-anak Indonesia dari buta huruf, kendala pada kenyataan di lapangan bahwasanya program wajib belajar 12 tahun atau biaya sekolah gratis hingga Sekolah Menengah Pertama tidak menjadi jaminan seseorang bisa memanfaatkan apa yang didapat di sekolah dengan ada di lapangan, kita mengetahui bahwa syarat minimal sekarang dalam mencari pekerjaan adalah minimal lulusan SMA (sekolah menengah atas)

Dengan demikian Bantuan Operasional Sekolah yang selama ini di salurkan kurang sempurna padahal Undang-Undang tahun 1945 misalnya, melalui Pasal 31 Ayat (2) mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya. Bahkan, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

7. Penanganan Anak Putus Sekolah

Persoalan putus sekolah merupakan tantangan bagi pekerja sosial. Data dari susenas menyebutkan ratusan ribu pelajar terancam putus sekolah, mereka berasal dari keluarga miskin. Anak usia sekolah dari keluarga miskin inilah yang potensial keluar dari bangku sekolah sebelum mengantongi ijazah.

Dua solusi untuk menolong anak putus sekolah yang tidak mampu yang baik adalah:

1. Membangun sekolah rakyat yang baik diperuntukkan bagi anak terlantar dan tidak mampu. Tidak dipungut biaya apa pun dikarenakan ketidaksanggupan membiayainya karena kemiskinan di mana pendirian sekolah tersebut seluruhnya ditanggung pemerintah setempat. Pemerintah setempat memiliki kewajiban melindungi dengan sikap tegas. Sekolah rakyat tersebut disetarakan dengan SD, SMP, SMA, dan Universitas yang berkualitas.
2. Jika negara dan pemerintah setempat tidak sanggup membiayai pembangunan sekolah bahkan yang sederhana sekali pun, kita, terutama warga negara yang memiliki uang gaji berlebih seharusnya memberikan sebagian uangnya kepada anak miskin untuk bersekolah.

B Kerangka Pikir

Ketercapaian ketuntasan dalam mencapai pendidikan sangatlah butuh perjuangan banyak faktor dan kendala dalam mengentaskan anak remaja dalam meraih pendidikan, kaena pada hakikatnya pendidikan merupakan sumber kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan utama yang tak dapat

disampingkan, sebab pendidikan ini membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama yang diridhoi Allah SWT

Hal lain yang mempengaruhi anak putus sekolah itu antara lain adalah latar belakang pendidikan orang tua,lemahnya ekonomi keluarga,kurangnya minat anak untuk sekolah,kondisi lingkungan tempat tinggal anak,serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan.dengan demikian yang dapat di jadikan variabel seperti dalam diagram kerangka pikir berikut ini:

